

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

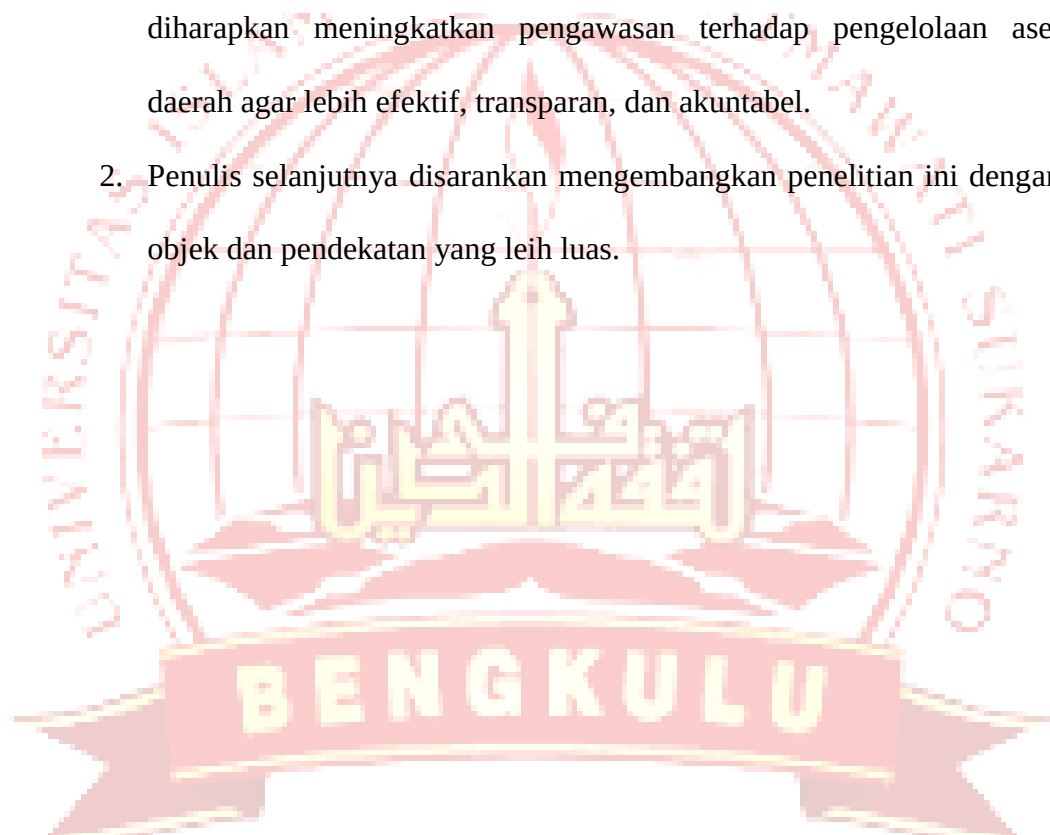
Berdasarkan hasil pembahsan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Selatan terhadap pengelolaan aset daerah belum berjalan optimal, yang ditandai dengan banyaknya aset daerah yang terbengkalai, lemahnya pencatatan dan pengamanan aset pada Organisasi Perangkat Daerah, serta rendahnya pemanfaatan aset bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Selatan belum memenuhi sebagian besar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, orientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas sehingga diperlukan pembenahan agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Tinjauan Siyasah Tanfiziyah terhadap Implementasi fungsi pengawasan DPRD Bengkulu Selatan terhadap aset daerah belum memenuhi prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Pengelolaan aset publik belum optimal, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat, serta belum memberikan nilai ekonomi dan sosial

bagi daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa pengawasan DPRD terhadap aset daerah belum sejalan dengan nilai-nilai Siyash Tanfiziyah yang memandang harta publik sebagai amanah untuk kepentingan umum.

B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
2. Penulis selanjutnya disarankan mengembangkan penelitian ini dengan objek dan pendekatan yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Dwiyanto. *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press.2023)
- Domai, Tjahjanulin, *Dari Pemerintahan Ke Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Depdagri, 2005)
- Dzajuli, A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003)
- Fahriani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2012)
- Fachrurazi, Kasmanto Rinaladi, Yudiyanto Joko Purnomo, Budi Harto, and Andina Dwijayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, ed. by Putra Harahap (Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021)
- Harianto and Bambang Martin Baru, *Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).Pdf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Hidayat, Muchtar, *Manajemen Aset (Privat Dan Publik)* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011)
- Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Kosasih Ade, Mahdi Imam , *Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPR Dalam Sistem Parlemen Bikameral*, (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2016)
- Mouwn Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., Rake Sarasin, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

- Sedarmayanti. *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi.* (Bandung: CV Mandar Maju 2012)
- Sidik, Machfud, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah* (Badung: PT Remaja Rosdakarya 2011)
- Sugiyanti Supriyanto. *Operasionalisasi Pelayanan Prima.* (Jakarta : LAN- RI. 2001)
- Sulistiyani. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia.* (Yogyakarta: Gava Media 2011)
- Suadi, A., *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2014)
- Susi Marni, Permatasari, M., Sembiring, T. B., Kusnadi, I. H., dkk.. *Hukum Administrasi Negara: Konsep dan Implementasi.* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara 2024)
- Sudrajat, Hendra, *Otonomi Daerah Dan Good Governance*, Ed. By Anny Riwayati (Surabaya: Cv. Mitra Mandiri Persada, 2024)
- Suwanda, Dadang, *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*, ed. by Nita Nur Muliawat (Badung: PT Remaja Rosdakarya, 2022)
- Suwanda, Dadang, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*, ed. by Agus Suharyono (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar’iyah Etika Politik Islam*, Risalah Gu (Surabaya, 1999)

Jurnal

- Amiri, Kartika, ‘Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Secara Akuntabel Menuju Good Governance’, *Potret Pemikiran*, 20.2 (2016), 1–44
<<https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.753>>
- Fauzi, H. Achmad, ‘Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 11.2 (2014), 197–211
<<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/352>>
- I. Nurhidayat, ‘Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia’, *Journal Education and Government Wiyata*, 1.1 (2023), 40–52
<<https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40>.
- Noviawati, Evi, ‘Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap

Penyelenggaraan Otonomi Daerah', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4.1 (2016), 47 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.410>>

Repository Stie Pgri Dewantara Jombang, 'Metodologi Penelitian', *Metodologi Penelitian*, 2016, 1–23 <[http://repository.stiedewantara.ac.id/1903/5/15.BAB 3.pdf](http://repository.stiedewantara.ac.id/1903/5/15.BAB%203.pdf)>

Rio Febriant Rizaldy, Komang Adi Sastra Wijaya, and Putu Eka Purnamaningsih, 'Optimalisasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pelayanan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya', *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2.1 (2024), 309–24 <<https://doi.org/10.61292/eljbn.134>>

Sulistiani, Dwi, 'Menuju Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)', *El-Muhasaba*, 8.1 (2017), 1–58

Syam, Syafruddin, 'Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia', *Al-Hadi*, 2.2 (2017), 485–98 <<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/156/138>>

Tenaya, Kadek Maharaja Wayan Suardana, 'Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Bali Dalam Pemanfaatan Aset Daerah', *Jurnal Kertha Desa*, 10.7 (2022), 473–82

Tunggal, Alfiner, 'Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman', 2014, 1–19

Skripsi

Budiyono, 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Budiyono Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung', *Ilmu Hukum*, 7.1 (2016), 1–12

Purwanto, Heri, 'Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong' Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, 2024)

Werdana, Arya, 'Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyyah)' (Universitas Ilam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Internet

Anonim, “Pemilu Dan Implikasinya Terhadap Penguatan Lembaga Legislatif Dan Pemerintahan Yang Aspiratif”, <https://bunghatta.ac.id> (Diakses pada 7 Februari 2023 Pukul 21.20 Wib).

Anonim, “Teori Lembaga Perwakilan”, <https://suduthukum.com> (diakses pada 26 Maret 2023 Pukul 15.37 WIB).

Anonim, “Teori Mandat: Mandat Imperatif, Mandat Bebas, Mandat Representative”, <https://text-id.123dok.com> (diakses pada 26 Maret 2023 Pukul 15.55 WIB)

Anonim, “Teori Lembaga Perwakilan”, <https://suduthukum.com> (diakses pada 30 Maret 2023 Pukul 14.21 WIB).

BPK RI, ‘Sejumlah Aset Daerah Mulai Terbengkalai’, *Media Indonesia*, 2024
<<https://bengkulu.bpk.go.id/sejumlah-aset-daerah-mulai-terbengkalai/>>

Hatta Ridho, “Peran lurah dalam pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden/wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah di kota tebing tinggi”, <https://ojs.uma.ac.id> (diakses pada 25 Maret 2023 Pukul 19.22 WIB).

Rio Agustian, Gedung Terbengkalai di Bengkulu Selatan Semakin Rusak, 2025
<<https://harianrakyatbengkulu.bacakorani.co/read/32934/gedung-terbengkalai-di-bengkulu-selatan-semakin-rusak>>

Yusuf Muzzammil, “Aspirasi Rakyat dan Reformasi Parlemen”
<http://library.stikptik.ac.id> (diakses pada 30 Maret 2023 Pukul 17.27 WIB).

Peraturan Perundang Undangan

Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, *Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021*, 2021, pp. 1–16

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014, pp. 1–153